

## **PRAKTIK SOSIO-KULTURAL SEBAGAI BENTUK KEWARGAAN MASYARAKAT TAHUN 1950AN: MELIHAT KEMBALI HISTORIOGRAFI KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NON-NEGARA**

**Agus Suwignyo, Rhoma Dwi Aria Yuliantri**

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,  
Program S3 Ilmu-Ilmu Humaniora, FIB UGM  
email: suwignyo\_agus@ugm.ac.id  
email: rhoma@uny.ac.id

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji gagasan kewargaan sosial (social citizenship) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada tahun 1950an. Sejauh mana proses menjadi Indonesia dalam dimensi sehari-hari tahun 1950an sebuah proses rakyat yang tidak elitis? Kajian dalam artikel ini memanfaatkan pemberitaan surat kabar sebagai sumber data. Dengan fokus-telaah pada agensi non-negara, artikel mengulas dimensi dan pola kewargaan yang dipraktikkan masyarakat melalui perkumpulan sosial, aktivitas kolektif masyarakat dan kegiatan-kegiatan budaya. Keterlibatan warga dalam berbagai saluran aktivitas menunjukkan tiga dimensi penting kewargaan sosial mereka. Pertama, wacana kewargaan yang cair dan terus mengalami negosiasi melalui perdebatan. Kedua, bentuk kewargaan sosial yang kebanyakan tersalurkan melalui aktivitas budaya sebagai objek material. Ketiga, ekspresi kewargaan sosial dalam aneka rupa perayaan terbuka sebagai cara komunitas-komunitas warga “menuntut” pengakuan publik atas keberadaan mereka. Ketiga dimensi menegaskan bahwa pembentukan kewargaan adalah proses sehari-hari masyarakat yang inklusif dan tidak selalu merupakan urusan negara.*

**Kata kunci:** kewargaan sosial, aktivitas budaya, 1950an, sejarah sehari-hari, Jawa

## **SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES AS CITIZENSHIP IN THE 1950S: RE-ASSESSING INDONESIAN NATIONAL HISTORIOGRAPHY THROUGH A NON-STATE PERSPECTIVE**

### **Abstract**

*This article examines the practices of social citizenship in the daily life of the Indonesian people during the 1950s. In particular this article aims at answering the question: In how far was the process of being an Indonesian during the 1950s a people-based process not part of the state building project of the government? By using newspapers published in the 1950s as the sources of data, this article analyzes the dimensions of social citizenship that people performed through social organizations and communal and cultural activities. This article argues that the people's participation in the many different channels of social and cultural activities during the 1950s showed three dimensions of social citizenship. First, it showed that the people's discourse of citizenship was 'fluid' and continuously adjusting to conform on-going negotiation and contestation. Second, communal and cultural activities were tangible forms of social citizenship through which people expressed their feeling as members of the Indonesian society. Third, carnivals and performances were a strategic medium for the people to acquire public recognition of their social existence. All the three dimensions suggested that the making of social citizenship during the 1950s was an inclusive process. They were embedded in the daily life of the people and were relatively distant from the state's project of nation building.*

**Keywords:** social citizenship, cultural activities, the 1950s, daily life, Java

## I. PENDAHULUAN

Artikel ini mengidentifikasi dan mengkaji praktik kewargaan sehari-hari tahun 1950an dengan mengangkat pertanyaan apakah berbagai aspek kehidupan sosio-kultural masyarakat pada periode tersebut merefleksikan ciri kewargaan sehari-hari di luar bingkai pembentukan negara. Sejauh mana proses menjadi Indonesia dalam dimensi sehari-hari tahun 1950an sebuah proses merakyat yang tidak elitis? Tahun 1950an telah digambarkan dalam historiografi Indonesia sebagai masa pembentukan negara-bangsa Indonesia. Dengan merujuk pada berita pada kolom-kolom kecil sejumlah surat kabar tahun 1950an sebagai sumber primer, artikel ini mencoba merangkai macam-macam kejadian dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kewargaan sosial masyarakat pada awal kemerdekaan juga meliputi praktik sehari-hari yang tidak selalu merupakan bagian proyek *nation-state building* oleh negara. Macam-macam kejadian tersebut secara substansi bisa dikatakan ”biasa-biasa saja” dan ”umum terjadi” sebagai peristiwa harian tetapi rangkaian narasi dan konteksnya mencerminkan ”arah” pembentukan identitas dan kewargaan masyarakat. Praktik kewargaan dimaknai sebagai ekspresi ”spontanitas” kolektif warga dan bukan sebagai bentuk pewujudan ide-ide elit politik/kaum intelektual yang disamakan melalui elemen-elemen *nation-state building*. Praktik kewargaan tersebut khususnya dilakukan atau dimotori oleh aktor-aktor non-negara dan berlangsung dengan atau tanpa ”bingkai” negara.

Beberapa studi tentang aspek kewargaan sosial (*social citizenship*) periode 1950an telah mengulas partisipasi warga dalam aktivitas budaya dan peran kelas menengah terdidik. Jennifer Lindsay dan Maya Liem, misalnya, menyajikan paparan tentang partisipasi warga dalam kegiatan kesenian khususnya pada bidang seni pertunjukan, seni suara dan seni rupa. Oleh program-program pemerintah, banyak kelompok kesenian pada tahun 1950an dikirimkan ke luar negeri sebagai duta budaya atas nama negara. Aneka bidang seni dimaknai selain sebagai wahana ekspresi juga sebagai wujud pencarian pemahaman tentang ”menjadi Indonesia” (Lindsay dan Liem, 2012). Studi oleh Henk Schulte Nordholt menguraikan peran kelas menengah terdidik tahun 1950an dalam menguatkan identitas keindonesiaan. Peran itu dijalankan antara lain melalui perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional dan melalui pendirian institusi pendidikan tinggi di bidang seni tradisi. Menurut Nordholt, Indonesia di mata kelas menengah terdidik tahun 1950an adalah Indonesia yang optimis tentang masa depan. Proses penguatan rasa kewargaan kelas menengah antara lain tercermin di dalam optimisme itu (Nordholt, 2011a: 386). Kajian-kajian dari aspek sosio-kultural ini melengkapi gambaran tentang periode 1950an, yang telah banyak dikaji oleh para sejarawan di bidang politik dan ekonomi.

Meskipun demikian, hampir semua kajian yang telah ada atas periode 1950an dari dimensi politik, ekonomi dan sosial—baik yang diproduksi di seputar periode 1950an maupun pasca kejatuhan rezim Orde Baru (misalnya Nordholt, Purwanto dan Saptari 2008a)<sup>1</sup>—menempatkan perspektif negara sebagai pintu masuk untuk memahami seluruh dinamika masyarakat masa itu. Sebagaimana dikatakan Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (2008b: 8), salah satu tema sentral kajian tentang 1950an adalah pembangunan nasion dan historiografi nasionalis yang anti-imperialisme dan bertumpu pada kejayaan bangsa sendiri. Dalam buku-buku sekolah dan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, periode 1950an disebut sebagai periode ”mengisi kemerdekaan” ketika kebanggaan-diri atas status baru kebangsaan dibarengi ”kegagalan pembangunan politik dan ekonomi”

---

1 Misalnya proyek penelitian ”Indonesia across Orders 1930s-1960s” yang dikoordinir oleh Lembaga Belanda untuk Dokumentasi Perang (*Nederlands Instituut voor Oorlog Documentatie*, NIOD)

(I Wayan Badrika, 2006: 94-119). Di sisi lain, dalam kajian-kajian para sejarawan dunia, periode awal kemerdekaan dinamai sebagai periode "percobaan demokrasi", "demokrasi liberal" atau "demokrasi konstitusional", dan "demokrasi terpimpin" (Ricklefs, 2001: 471 & 508). Konsep yang melandasi penamaan itu merujuk pada model pemerintahan sebagai elemen kunci dalam struktur kenegaraan yang berlaku saat itu. Dalam kajian-kajian itu, perspektif yang berpusat pada negara terlihat dari cara menempatkan aspek administrasi pemerintahan dan konseptualisasi politik kebangsaan dalam memaknai apa itu "Indonesia".

Dengan dijadikannya proyek *nation-state building* sebagai pintu masuk untuk memotret dinamika masyarakat tahun 1950an, konstruksi atas kewargaan Indonesia melulu merupakan cetakan dari desain dan konsep yang diimajinasikan, disusun dan dikembangkan oleh elit-elit terdidik. Tujuan konstruksi kewargaan yang *state-centric* tersebut bernuansa *top-down*, yaitu untuk melibatkan dan menggerakkan massa-rakyat dalam proses menjadi bangsa yang bersatu dan dinamis. Di situ terkandung asumsi bahwa rakyat tidak berdaya dan tidak memiliki inisiatif sendiri dalam kehidupan kolektif. Antusiasme dan partisipasi warga dalam berbagai dimensi politik dan sosio-kultural tahun 1950an seolah-olah berkembang hanya di dalam bingkai dan atas stimulasi program-program "mengisi kemerdekaan".

Penggambaran atas konstruksi kewargaan tahun 1950an itu kontradiktif dengan bagaimana partisipasi massa-rakyat pada dua dekade sebelumnya direpresentasikan. Massa-rakyat di tahun 1930an dan 1940an digambarkan sebagai aktif terlibat dengan "sangat berdaya" di dalam berbagai dimensi perkembangan masyarakat entah melalui arena politik kekuasaan dan perkumpulan maupun melalui aktivitas sosial ekonomi. Dalam berbagai versi tulisan sejarah tentang periode 1945—1949, yang juga umum disebut Periode Revolusi dan Periode Perang Kemerdekaan, terpaparkan bahwa seluruh lapisan masyarakat mengambil bagian perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Konsekuensinya, kemerdekaan Indonesia itu dinyatakan sebagai hasil perjuangan *seluruh komponen* bangsa Indonesia.

Akan tetapi, massa rakyat tahun 1950an yang kurang-lebih merujuk pada kelompok dan entitas demografi yang sama dengan massa rakyat tahun 1930an dan 1940an, digambarkan sebagai pasif dan "tidak tahu apa-apa" tentang makna menjadi warga sebuah negara merdeka. Kegairahan rakyat dalam kehidupan publik pada periode 1950an dipotret melulu sebagai wujud respons warga terhadap stimulasi program-program pembentukan negara. Cara pandang ini telah melahirkan historiografi tentang 1950an yang lingkup wacananya *nation-state building* tetapi yang prosesnya minus dinamika rakyat dalam keseharian mereka. Historiografi yang ada cenderung mengabaikan proses "internal" masyarakat yang secara hakiki telah berlangsung sebelum terbentuknya negara Indonesia. Misalnya, antusiasme dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari modernisasi kultural (*cultural modernity*) yang berkembang pesat di awal abad keduapuluh (Nordholt, 2012b: 435-457), tidak (di)muncul(kan) dalam historiografi 1950an atau, jika (di)muncul(kan), ditempatkan sebagai bagian dari proses politik-ideologi. Perspektif yang demikian telah menarik semua proses historis secara *top-down*, berpusat pada negara dan mengabaikan dinamika akar-rumput yang horisontal dan interaktif. Kuatnya wacana negara atas narasi kewargaan dan adanya dominasi historiografi yang berpusat pada negara telah menutupi praktik partisipasi massa-rakyat yang di dalamnya sendiri terus berproses untuk menemukan hakikat dan makna ikatan kolektif kewargaan.

Dengan fokus pada praktik kewargaan non-negara, artikel ini dimaksudkan untuk menghadirkan keseimbangan dan pluralisasi narasi tentang penciptaan makna kewargaan tahun 1950an sesuai konteks

dan kondisi saat itu. Seperti dikatakan Nordholt di kesempatan lain, periode 1950an harus dikaji dengan dan di dalam narasi periode itu sendiri agar dinamika dan kompleksitas dari lingkup waktunya dapat diungkap (Nordholt, 2011a: 386). Juga sebagaimana dikatakan Jennifer Lindsay, mengkaji periode 1950an dengan dan di dalam wacana periode 1950an itu sendiri memungkinkan terungkapkannya dinamika periode tersebut bukan sebagai ”pendahuluan” atas episode tragis 1965 (Lindsay, 2011: 4-5). Pada bagian berikut diuraikan konseptualisasi tentang “kewargaan tanpa negara” dan identifikasi tantangan metodologis yang muncul dalam penerapannya. Setelah itu dipaparkan praktik kewargaan sosial masyarakat berdasarkan sumber-sumber sejarah. Artikel diakhiri dengan Kesimpulan.

## II. KONSEPTUALISASI: “KEWARGAAN TANPA NEGARA”

Sejauh ini teori-teori tentang ’kewargaan (*citizenship*)’ menegaskan pentingnya partisipasi dan pengakuan atas peran dan posisi-sejajar individu dalam proses-menjadi bersama suatu kelompok/masyarakat. Konsep kewargaan mensyaratkan adanya dimensi individu dan dimensi kelompok. Ada unsur keterlibatan dan rekognisi. Ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Konsep kewargaan selalu didefinisikan oleh matriks yang terbentuk oleh dimensi, pola dan prinsip itu, yaitu dimensi individu *versus* kelompok, pola keterlibatan *versus* pengakuan dan prinsip keadilan *versus* kesetaraan. Bertolak dari pengalaman terbentuknya negara-bangsa di Eropa pasca Revolusi Perancis dan Revolusi Industri, teori-teori kewargaan menegaskan bahwa pengakuan kesetaraan atas partisipasi individu di dalam “proses menjadi” sebuah masyarakat adalah dasar bagi penguatan kapasitas struktur masyarakat itu. Menurut teori-teori itu, konsep kewargaan secara garis besar dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu kewargaan politik (*political citizenship*), kewargaan sipil (*civil citizenship*) dan kewargaan sosial (*social citizenship*) (Marshall, 1950).

Kewargaan politik berkaitan dengan partisipasi dalam praktik-praktik politik formal kekuasaan, misalnya pemilihan kepala pemerintahan. Kewargaan sipil merujuk pada partisipasi dalam pemenuhan aspek-aspek kependudukan, misalnya partisipasi dalam pendataan warga melalui catatan sipil dan pendaftaran wajib-pajak. Kewargaan sosial berkaitan dengan partisipasi dalam proses bermasyarakat sehari-hari, misalnya aktivitas kolektif dan interaksi sesama warga. Ketiga kategori kewargaan ini berbeda satu-sama lain, tetapi semua terarah pada pembentukan negara (Marshall, 1950).

Adanya warga dengan kesadaran kewargaan yang terus-menerus menguat merupakan syarat pembentukan negara. Negara memiliki kebutuhan dan kepentingan untuk membuat agar warganya memiliki kesadaran kewargaan. Warga dengan kesadaran kewargaan (yang disebut *citizen*, warga negara), merupakan pilar bagi upaya negara mencapai tujuannya. Salah satu tujuan lahirnya negara adalah meningkatkan harkat dan kesejahteraan warga (Bertrand dan Laliberte, 2010). Dengan kata lain, penguatan kesadaran kewargaan dalam konteks pembentukan negara dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas negara agar mampu menyejahterakan rakyat. Namun pendapat tersebut melulu bertolak dari perspektif negara. Di dalam bingkai penguatan kapasitas negara, upaya penguatan kewargaan berlangsung/dilakukan dengan landasan dan sesuai cita-cita ideologi negara. Meskipun upaya yang demikian memiliki legitimasi politik, prosesnya cenderung eksklusif. Ia eksklusif terhadap realitas historis masyarakat. Artinya, proses menjadi warga seolah-olah baru berlangsung ketika ada negara atau, lebih tepatnya, ketika negara menegaskan kebutuhan akan hal itu.

Dalam pengalaman negara-bangsa bekas koloni Barat di Asia Tenggara, praktik dari konsep kewargaan yang demikian tidak semata-mata terjadi dan berlangsung karena adanya struktur negara. Hingga jauh setelah munculnya negara-negara yang berlandaskan prinsip liberalisme Eropa, sebagaimana dikatakan Anthony Reid, banyak komunitas bangsa di Asia Tenggara tetap tinggal sebagai komunitas yang kehidupan kesehariannya tidak terkait dengan urusan dan kebutuhan negara (Reid, 2010: 29-50). Institusi negara-bangsa tidak selalu pas atau cocok dengan kompleksitas politik dan kultural masyarakat. Sebagaimana dikatakan Soon Chuan Yean, relasi negara dan rakyat tidak cukup memadai untuk mendesak kepada rakyat kesadaran kewargaan dan untuk memahami peran sehari-harinya di dalam konteks kesadaran kewargaan itu. Soon Chuan Yean (2012: 273-299) menegaskan pentingnya ”penggalan aneka modalitas dan wacana tersembunyi” yang selama ini dilihat secara sambil lalu saja dalam proses kewargaan pasca bermunculannya negara-bangsa. Yang dimaksud adalah historisitas kehidupan masyarakat, yaitu aktivitas keseharian yang telah dilakukan massa-rakyat sebelum adanya proyek pembentukan negara-bangsa. Aktivitas keseharian itu juga tetap dilakukan oleh rakyat setelah berkembangnya proyek negara-bangsa yang sangat gencar pasca Perang Dunia II.

Dengan kata lain, pada praktiknya ada jenis ”kewargaan” yang berlangsung ”tanpa negara”. Praktik sehari-hari kehidupan masyarakat merupakan wujud ”kewargaan tanpa negara” ketika ia secara substansi menunjukkan dimensi, pola dan prinsip-prinsip dasar dari konsep kewargaan, yaitu ada unsur partisipasi dan pengakuan, kesetaraan dan hak, serta individu dan kelompok. Sebagaimana tersampaikan pada kesempatan lain, kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan kewargaan *parexcellence* karena menghadirkan wujud konkrit partisipasi kolektif warga yang ”apa adanya” (Suwignyo, A. & Rhoma Dwi Aria Yuliantri, proses terbit). Meskipun demikian, praktik-praktik tersebut secara bentuk terlalu sederhana dan terlalu terserak-serak untuk dimasukkan ke dalam konsep kewargaan yang diakui di dalam pakem formal konsep kewargaan yang terinstitusi. Tema dan cakupan peristiwa dalam praktik kewargaan non-negara tidak menunjuk pada proses formal apapun tentang pembentukan negara tetapi terkait dengan isu-isu atau hal-hal harian yang bersifat *human interest*. Artinya, peristiwa kewargaan non-negara selalu mengandung muatan isu-isu kemanusiaan yang kejadiannya dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Karena sifatnya yang *human interest*, cakupan praktik kewargaan non-negara dapat sangat beragam dan rupa-rupa.

### **III. TANTANGAN METODOLOGI**

Pendekatan ilmu sejarah untuk mengkaji praktik kewargaan sosial membutuhkan bantuan objek material sebagai sumber primer yang mampu memotret kehidupan sehari-hari masyarakat secara kontinyu. Dalam hal ini, peran surat kabar/koran menjadi krusial dalam menentukan representasi atas praktik kewargaan non-negara karena sifat pemberitaannya berkala (entah harian atau kala periodik lainnya). Meskipun demikian, penggunaan pemberitaan surat kabar sebagai sumber sejarah juga mengandung berbagai tantangan metodologi yang perlu diselesaikan. Surat kabar secara sadar melakukan seleksi tentang peristiwa apa saja yang menurut kriteria yang mereka tetapkan sendiri ”layak” untuk direkam dalam pemberitaan, dan peristiwa apa saja yang tidak dapat/tidak mungkin diberitakan karena pertimbangan tertentu. Di sini tantangan-tantangan metodologi perlu diidentifikasi secara detil.

Artikel ini menyajikan rangkaian peristiwa sehari-hari rakyat, didasarkan pada pemberitaan koran-koran tahun 1950an yang masih dapat diakses saat ini. Koran-koran itu adalah *Kedaulatan Rakyat*, *Pemandangan* dan *Suara Masyarakat*. Seleksi atas koran-koran ini terbatas pada koleksi Jogja Library Center di Jalan Malioboro, Yogyakarta dan koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta diakses antara Mei dan Oktober 2017.

Sekali lagi, meskipun surat kabar memotret dinamika sehari-hari yang faktual sifatnya, tetapi penggunaan surat kabar sebagai sumber data dalam penelitian ini mengandung persoalan dari beberapa sisi. Pertama, sebagaimana dalam prinsip jurnalistik umumnya, cakupan atas pemberitaan tentang suatu peristiwa—yaitu peristiwa mana yang masuk koran dan mana yang tidak—dipengaruhi oleh preferensi pemilik ataupun editor surat kabar. Preferensi ini ditentukan oleh banyak faktor, misalnya garis ideologi, kepentingan politik dan pertimbangan bisnis. Karena itu, meskipun sifat beritanya hari ke hari, koran tidak mampu mewadahi semua peristiwa yang terjadi. Proporsi pemberitaan koran selalu membawa bias representasi atas peristiwa-peristiwa sebagai fakta keseharian masyarakat. Meskipun ada keterbatasan ini, koran tetap merupakan wadah yang memiliki kadar representatif paling memadai yang menangkap peristiwa harian masyarakat di suatu periode dibandingkan sumber-sumber lainnya yang sejamin. Dalam artikel ini, persoalan bias representasi diatasi dengan kategorisasi yang rinci atas substansi pemberitaan yang dipilih sebagai sumber data. Kategorisasi dilakukan berdasarkan kesesuaian pesan tersebut dengan unsur-unsur dalam konsep kewargaan non-negara khususnya menyangkut aspek dimensi dan pola. Namun pemilahan sumber juga memperhatikan karakteristik data yang ditemukan, misalnya apakah praktik kewargaan berwujud aktivitas institusi sosial tertentu atau pada praktik interaksi warga.

Kedua, soal *readability* atau keterbacaan surat kabar. Meskipun memotret peristiwa sehari-hari, surat kabar hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu dalam masyarakat, yaitu kalangan yang melek huruf dan dapat membaca. Sebagian besar warga Indonesia tahun 1950an tidak dapat membaca huruf latin. Adanya gerakan pemberantasan buta huruf yang secara berkesinambungan dilakukan di era tahun 1950an menunjukkan tingginya angka buta huruf rakyat. Contoh kasus adalah di Surabaya tahun 1952. Jumlah murid yang lulus pemberantasan buta huruf sejak pemerintah RI berdiri hingga 1952 adalah 3591 laki-laki dan 1381 wanita. Penduduk Surabaya kala itu berjumlah 899.461 orang. Sekitar 56 persen masyarakat Surabaya waktu itu adalah buta huruf (*Suara Masyarakat/SM*, 26 Agustus 1952). Data tentang Surabaya itu sekedar sampel yang menggambarkan bahwa tidak semua warga masyarakat tahun 1950an dapat membaca. Akses keterbacaan media tulisan, seperti surat kabar, terbatas hanya oleh mereka yang dapat membaca. Artinya, sementara apa yang dipaparkan di surat kabar dapat menggambarkan praktik kewargaan sehari-hari rakyat, diskusi dan wacana tentang praktik kewargaan itu sangat mungkin hanya terbatas pada kalangan tertentu khususnya kelas menengah ke atas yang mampu membaca.

Ketiga, ada persoalan dengan cara mengkategorikan pola atas berita-berita keseharian yang sifatnya terserak-serak. Berita-berita yang memuat peristiwa sehari-hari masyarakat yang memiliki unsur kewargaan, umumnya berupa berita pada kolom-kolom kecil surat kabar. Variasi peristiwa yang diberitakan sangat tinggi, misalnya peristiwa pencurian, peristiwa kawin dan khitan massal hingga peristiwa kerjabakti dan pertemuan organisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan berita-berita yang sifatnya terserak-serak itu ke dalam satu rangkaian yang dapat dibaca dalam bingkai kewargaan. Persoalan tentang keterserakan berita ini diselesaikan dengan merinci aspek kewargaan

yang diteliti. Rincian itu mencakup dimensi dan pola praktik kewargaan. "Dimensi" merujuk pada aspek atau unsur, yang dalam konteks praktik kewargaan dapat meliputi dimensi aktor atau pelaku dan dimensi isu atau substansi aktivitas/kejadian. Sementara itu, "pola" merujuk pada struktur yang terulang-ulang dalam praktik kewargaan. Pola atau pengulangan struktur dapat mencakup pola keterlibatan (*engagement*) dan pola pengakuan (*recognition*). Tabel 1 menunjukkan dimensi dan pola kewargaan non-negara dan rincian cakupan masing-masing. Secara keseluruhan, baik menyangkut dimensi maupun polanya, jenis berita yang dipilih menunjukkan perwujudan prinsip adil dan setara sebagai prasyarat dasar dari konsepsi kewargaan.

**Tabel 1: Dimensi dan Pola Kewargaan sebagai Kerangka Metodologi**

<p>Dimensi aktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individu/person</li> <li>• kelompok/organisasi/perkumpulan</li> </ul>	<p>Dimensi isu/substansi aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domestik individual (secara sosial horisontal)</li> <li>• publik kolektif (secara sosial vertikal)</li> <li>• di antara</li> </ul>
<p>Pola keterlibatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spontan insidental</li> <li>• terancang/terprogram berkelanjutan</li> </ul>	<p>Pola pengakuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kemunculan partisipasi individu langsung</li> <li>• kemunculan partisipasi representasi</li> <li>• exposure kolektif/organisasi</li> </ul>

#### IV. PRAKTIK KEWARGAAN SOSIAL TAHUN 1950AN

Indonesia pada tahun 1950an adalah negara yang berada dalam "masa-masa cair", ketika gagasan-gagasan komunis, kosmopolitan, nasionalistik atau modern (Day, 2010: 1-2) yang memberi pengaruh pada proses kewargaan sama-sama berkembang dan memberi "warna" pada kehidupan masyarakat. Artinya, pada tahun-tahun tersebut terjadi amplifikasi (pembesaran) proses berkembangnya kesadaran kewargaan yang bersifat "keluar" (*outward*), sebagai kelanjutan dari apa yang telah berkembang pada awal abad kedua puluh. Di sisi lain, pada periode yang sama terjadi penguatan atas kesadaran kewargaan melalui lembaga-lembaga serta interaksi satu sama lain yang bersifat ke dalam (*inward*).

Periode 1950an menyajikan dinamika sehari-hari yang menunjukkan pemahaman rakyat atas makna kewargaan. Dekade tersebut merupakan masa pembentukan kembali masyarakat yang telah tercerai-berai—secara fisik harafiah maupun simbolis-struktural—oleh perang yang berlangsung hampir sepuluh tahun (1942—1949). Berbagai aspek kehidupan masyarakat mencari bentuknya kembali tidak hanya dalam konteks proyek *nation-state building*, tetapi juga dalam konteks penguatan masyarakat sebagai sebuah *gezelschap* atau paguyuban sosio-kultural.

Narasi dari koran-koran berikut ini menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari massa-rakyat tahun 1950an menunjukkan dinamika dan persoalan kehidupan rakyat itu sendiri. Dinamika sehari-hari massa-rakyat tahun 1950an tersebut merupakan wujud kewargaan yang "apa adanya". Artinya, ia mencerminkan kebutuhan warga sendiri akan relasi dan keterlibatan sosial. Proses sehari-hari kewargaan berlangsung karena ikatan kolektif masyarakat dan bersifat horisontal interaktif. Sebagaimana dikatakan Adrian Vickers, periode 1950an menghadirkan tidak hanya hal-hal yang terkait dengan proyek *nation-state building* seperti "semangat membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan kolonial dan keinginan mengabdikan pada pembangunan sebuah negara baru", tetapi juga

pernak-pernik terkait kehidupan, di antaranya “keinginan untuk menyerap semua yang dianggap modern” (Vickers, 2008: 69), sebuah keinginan yang oleh Nordholt disebut *cultural citizenship* atau kewargaan budaya (Nordholt, 2001b).

### **A. Negosiasi ”Kuno” dan ”Modern” sebagai Wacana Kewargaan Sosial**

Bagaimana ambiguitas tentang semangat ”modern” yang selalu dipertentangkan dengan ”kuno” menjadi dilema sejak kolonial, terus mewarnai pencarian identitas menjadi Indonesia hingga ke tahun 1950an. ”Modern” selalu digambarkan mengacu pada Belanda dan ”Barat” pada umumnya. Sebaliknya, ”kuno” adalah referensi kepada kebiasaan lokal. Ambiguitas ini tergambar dalam novel bersambung yang dimuat dalam *Bintang Timoer*, yaitu novel ”Modern dan Kuno” atau ”Salah Asuhan” karya Abdul Moeis tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dengan perempuan indo modern. Dilema tersebut terus mewarnai perdebatan ”menjadi Indonesia” dan tidak pernah selesai, meski institusi dan struktur sosial telah mengalami perubahan drastis di era pendudukan Jepang.

Ruang kebudayaan merupakan salah satu contoh paling mudah untuk melihat bagaimana ”ambiguitas” itu terus diperdebatkan. Kebudayaan dinilai dan diyakini oleh masyarakat pemiliknya sebagai wujud tingginya derajat suatu bangsa, maka nilai-nilai yang bersifat lokal tidak boleh ditinggalkan. Dalam perdebatan tentang produk budaya terlihat apa yang dianggap tidak nasional dan ”merusak” generasi muda.

Secara keseluruhan warisan budaya lokal/pra-kolonial dianggap memiliki nilai yang nilai-nilai nasional ke-Indonesia-an. Pertunjukan yang memiliki nilai-nilai ”lokal” itu diberi apresiasi dengan positif. Salah satu contohnya dapat dilihat dari narasi pemberitaan surat kabar dalam sebuah pertunjukan. Misalnya tatkala *Suara Masyarakat*(*SM*) memberitakan kesenian tari dari Jawa Tengah, menggambarkan Wireng Ketjil Ongkowidjodo-Tjakil, yang diadakan oleh keluarga Matosin dan dimainkan oleh anak-anak di Embong Sawo Surabaya selama tiga hari berturut-turut. *Suara Masyarakat* menurunkan berita dengan narasi ”kesenian tari.... juga bagi kanak-kanak sangat penting artinya guna menciptakan jiwa yang dinamis dan menebalkan perasaan nasionalnya” (*SM*, 27 Agustus 1952).

Tari-tarian yang warisan pra-kolonial ini adalah kebudayaan yang dianggap ”asli”, sebagaimana terungkap dalam pemberitaan lain: ”Dengan mendapat perhatian besar baik dari undangan maupun publik pada minggu yang lalu selama 3 hari berturut-turut oleh keluarga Majosin di Embong Sawo, Surabaya telah dilangsungkan malam kesenian dengan maksud untuk mengembangkan kesenian asli kita” (*SM*, 27 Agustus 1952). Kesenian yang dimaksud dalam pertunjukan tersebut adalah tarian Jawa Wireng Gamberanum Gandrung.

Pertunjukan-pertunjukan warisan budaya lokal ini diadakan bersanding dengan budaya-budaya yang dianggap ”Barat dan modern”. Prosesnya melibatkan partisipasi warga baik sebagai penonton atau pelaku kesenian. Ada pula pencampuran berbagai cerita, seperti pertunjukan tari balet dipadu lagu-lagu serius yang digagas oleh Chairul Saleh di Gedung Olahraga Djakarta (*Pemandangan*, 8 November 1956). Juga pertunjukan malam gembira di Gedung Chung Hua oleh Mitra Sunda Bandung. Sandiwara berjudul ”Kijai Tapa” itu menyajikan kisah antara Yakdir dan Takbit dipadukan dengan Gending Karesmen (*Pemandangan*, 12 Februari 1957). Pemanfaatan ruang publik menunjukkan bagaimana apa yang dianggap ”asing” dan ”asli” dikompromikan. Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*

(KR), 7 Februari 1955, misalnya, memberitakan pemanfaatan areal Alun-alun Selatan di Kompleks Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai jenis kesenian. Berita tersebut menyebutkan bahwa tiap-tiap malam Minggu, “alun-alun Selatan yang merupakan salah satu daerah yang sepi dalam kota, oleh Badan Kesenian Kotapraja Jogjakarta mendapat pertunjukan-pertunjukan film terbuka untuk umum”. Tujuan pemutaran film di alun-alun adalah “mengusahakan agar penduduk daerah selatan dari kota mendapat kesempatan juga untuk menghibur diri dengan hiburan-hiburan yang percuma, sambil mengusahakan agar alun-alun selatan menjadi pusat keramaian dalam kota seperti alun-alun utara sehingga keramaian kota dapat dibagi-bagi”.

Pertunjukan film yang diusahakan itu adalah kerjasama dengan Jawatan Penerangan Kotapraja. Karena itu, “dengan cara bergiliran diusahakan pula pertunjukan sandiwara”. Dengan bantuan pihak RRI Yogyakarta maka siaran-siaran uyon-uyon, ketoprak dan dagelan yang dilangsungkan dari dalam Ngabean, sebelah barat alun-alun selatan, diperbolehkan juga untuk dilihat oleh umum, “sehingga tempat-tempat hiburan percuma bertambah”. Menurut keterangan Ketua Badan Kesenian Kotapraja, Judaningrat, usaha meramaikan alun-alun selatan itu “paralel dengan usaha pihak Kotapraja sendiri untuk segera dapat membangunkan sebuah *schouwburg* (gedung pertunjukan) untuk keperluan kesenian-kesenian rakyat”(KR, 7 Februari 1955).

Pertunjukan dengan kemasan Barat seperti film-film yang diputar dalam gedung-gedung bioskop, juga marak. Setiap hari dalam pojok koran diberitakan film-film yang sedang diputar di bioskop, seperti film-film “Autumn Leaves” di Bioskop Astoria dan Menteng Cinema, atau “Shree 420” yang diputar di Bioskop Rivoli, dan lain-lainnya (*Pemandangan*, 3 Oktober 1956). Nuansa kelas sosial juga mewarnai dunia pertunjukan. Misalnya, ada upaya untuk mengiklankan pertunjukan di gedung bioskop yang harganya mahal. Di pintu masuk sebuah gedung pertunjukan di Pacitan, Karesidenan Madiun tertulis dengan huruf besar “NOOD-DUUR”, artinya “sangat mahal”, dengan harga tiket masuk di atas rata-rata yang bisa dijangkau masyarakat umum (*SM*, 9 September 1952). Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Universitas Indonesia juga memutar film. Judulnya “Heboh” dan “Si Dudung”. Keduanya film anak-anak. Film diputar di Gedung Teater Mahasiswa Jalan Salemba 4 antara jam 11 dan 13.00 pada tanggal 16 dan 23 Desember 1956 (*SM*, 15 Desember 1956).

## **B. “Stop Dansa” dan Aktivitas Budaya sebagai Bentuk Kewargaan Sosial**

Salah satu dari wacana kewargaan tahun 1950an terkait dengan pembentukan identitas budaya masyarakat. Diskusi dalam upaya dan proses pembentukan identitas kebudayaan itu tidak saja melibatkan negara dan organisasi-organisasi masyarakat tetapi juga oleh masyarakat dengan berbagai cara padang. Mereka umumnya adalah dari kelas terdidik yang gagasan atau idenya dapat ditelusuri di rubrik semacam “opini” yang disediakan oleh media massa. Gagasan-gagasan yang bersifat individu inilah yang kemudian berguna untuk menelusuri sumbangan kewargaan yang bersifat personal. Bagaimana individu-individu tersebut memberi sumbangan ide dan pemikiran terkait masa depan dan identitas negara. Dalam pertukaran gagasan tentang pembentukan identitas budaya Indonesia itu, perihal orientasi dan rujukan patronase budaya telah menimbulkan kutub-kutub pendapat yang meruncing antara kategori “identitas Barat” dan “identitas Timur”.

Perdebatan Barat dan Timur dalam bingkai identitas kebangsaan merupakan salah satu perdebatan yang tidak ada habisnya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, perdebatan tersebut telah diangkat oleh

golongan terdidik seperti Sanusi Pane dan Sutan Takdir Alisjabana (Sutan Takdir Alisjabana, 1954: 12). Perdebatan keduanya kemudian menggiring pada dua kubu yang sebagian berpendapat bahwa budaya Indonesia tidak boleh lepas dari budaya Timur dan harus lepas dari bingkai budaya Barat, sementara yang lain berpandangan bahwa nilai-nilai budaya Barat terbaik harus diambil supaya bangsa Indonesia dapat duduk sejajar dengan bangsa-bangsa Barat. Wacana perdebatan budaya Barat dan Timur bukan hal sederhana dan wacananya terus bergulir pasca kemerdekaan. Keruwetan dan perdebatan terjadi dalam memilah mana yang menjadi bagian budaya "Barat" yang dianggap merusak itu dan mana bagian "budaya Indonesia". Namun dalam seluruh perdebatan itu, sebenarnya apa makna dan batasan "Barat" dan "Timur" dalam konteks hibridasi budaya di Nusantara tidak terlalu jelas maupun definitif.

Upaya pemisahan budaya Barat yang dipandang tidak sesuai dengan budaya nusantara tersebut didiskusikan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat. Salah satunya adalah melalui satu acara diskusi pemuda dari sebuah organisasi Islam (meskipun mereka yang hadir menyatakan bukan wakil dari organisasi) yang dilangsungkan di gedung Panti Pemuda Pasar Besar Watan 21 Surabaya, 22 Juli 1952 (*SM*, 23 Juli 1952). Hingga tengah malam diskusi berlangsung, memanas dan keluar dari jalur yang diagendakan. Dalam adu argumentasi yang panas itu, para peserta saling berbeda pandangan menyoal sebuah topik gaya hidup yang *trend* sejak akhir masa kolonial di kalangan kelompok terdidik di Hindia Belanda dan terus menjadi *trend* pada tahun 1950an, yaitu aktivitas dansa (*SM*, 23 Juli 1952).

Di tahun 1950an itu, aktivitas dansa kian marak di Kota Surabaya. Setelah perdebatan berjam-jam, pada tengah malam para peserta rapat pemuda Islam itu membentuk panitia yang diberi nama "Panitia Pemberantasan Pengaruh Dansa". Panitia ini mempunyai tugas untuk mengadakan rapat lagi mengundang wakil-wakil organisasi massa, partai-partai, kaum buruh dan masyarakat umumnya untuk memberikan penerangan bahwa budaya dansa telah melewati batas-batas kesopanan (*SM*, 23 Juli 1952). Peserta rapat sebagian besar menganggap dansa sebagai salah satu budaya Barat yang merusak identitas masyarakat nusantara.

Sekitar satu minggu berselang, gagasan para pemuda tersebut mendapat perhatian dari Datta Wardhana dan Muhammad MS. Datta Wardhana, seorang penulis opini, menanggapi berita dibentuknya "Panitia Pelarangan Dansa" di Surabaya. Satu hal yang dipertanyakannya adalah mengapa larangan dansa seolah-olah menjadi menggema hebat dalam masyarakat (Wardhana, D., *SM* 31 Juli 1952). Sementara itu Muhammad MS, yang juga seorang penulis opini surat kabar, berpendapat bahwa dukungan yang kuat untuk "Panitia Gerakan Anti Dansa" muncul karena "masyarakat lebih-lebih mereka yang beragama" memang tidak menyukai dansa (Muhammad MS, *SM* 7 Agustus 1952). Kala itu Panitia Anti Dansa yang digagas oleh pemuda-pemuda Islam ini mendapat dukungan dari organisasi agama dan juga dari LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakjat), Pemuda Rakjat, Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia (*SM*, 23 Juli 1952).

Menurut Datta gerakan pelarangan dansa adalah suatu "kegagalan yang naif". Logika yang disajikan Datta diperkuat dengan merujuk berbagai pemikir seperti Oswald Spengler, John Stuart Mill, J. Van Kan, dan Sutan Sjahrir (Wardhana, D., *SM*, 31 Juli 1952). Datta menyatakan bahwa sudah sewajarnya jika sebuah budaya menerima pengaruh dan dibentuk oleh berbagai sumber budaya lain dan karena itu muncul anggapan yang berlainan atas pengaruh-pengaruh itu. Gerakan pelarangan dansa yang agresif menurut Datta justru melanggar hak azasi manusia dan hukum negara. Datta juga mempertanyakan ukuran dari norma kesucilaan dan kesopanan sebagai parameter larangan dansa karena menurutnya acara *tayuban* yang kerap digelar dalam setiap hajatan juga tidak jauh dari vulgar

(Wardhana D, *SM*, 31 Juli 1952). Selain itu pejabat pemerintah di Balai Kota Surabaya juga banyak yang bergabung dengan klub-klub dansa.

Mengutip Sutan Sjahrir, Datta mengatakan “kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang akan mendorong usaha-usaha yang lebih bermanfaat bagi masyarakat terutama kalau tindakan dipimpin tadi oleh pikiran-pikiran yang tidak tenggelam dalam perkobaran sentimen” (Wardhana, D., *SM*, 31 Juli 1952). Dari sini Datta berkesimpulan bahwa pelarangan dansa, yang menurutnya hanya berlandaskan pada sentimen, tidak memberi manfaat pada masyarakat.

Namun pandangan Datta tersebut oleh Muchammad MS dianggap ”sangat membela kebudayaan asing”. Muchammad MS melihat bahwa ”Gerakan Panitia Anti Dansa” semacam upaya “penyelamatan” identitas dengan jalan memberi pencerahan kepada “generasi baru” yang menurutnya memiliki jiwa yang masih orisinal agar tidak terpengaruh oleh “kuman-kuman kolonial baik dalam lapangan politik dan pengadjaran” (Muhammad MS, *SM* 7 Agustus 1952). Muhammad MS juga menegaskan betapa pentingnya Panitia Gerakan Anti Dansa ini. Dia menolak pernyataan Datta yang menyebutkan bahwa banyak pelanggaran sosial yang belum diperbaiki di luar konteks kegiatan dansa (Muhammad MS, *SM* 7 Agustus 1952).

Tidak mau kalah, Muhammad MS mengutip pendapat Bung Karno untuk memperjelas buruknya pengaruh dansa. Katanya, “akibat politisi jang tidak baik, terutama bagi masa sekarang, di mana dansa bisa menarik perhatian pemuda/pemudi dari perjuangan juga” (Muhammad MS, *SM* 7 Agustus 1952). Menurut Muhammad, tidak ada salahnya mengambil contoh dari negara lain asal tidak merusak masyarakat. Keyakinannya ini mengacu pada pujangga India Sir Achmad Ali Khan, yang disebutkan mengatakan “segala yang datang dari Barat jangan diterima begitu saja, dan jangan dibuang begitu saja, hendaknya disaring dan ditimbang lebih dulu” (Muhammad MS, *SM* 7 Agustus 1952).

Perdebatan antara Datta Wardhana dan Muhammad MS mendapat perhatian dari organisasi yang menamakan dirinya “Pemuda Demokratik”. Pada pengantar artikelnya, wakil “Pemuda Demokrat” menulis:

“Gerakan anti dansa jang tjukup disokong oleh golongan2an jang kuat. Di samping itu ada pula golongan2 jang pro dansa djuga mempunjai penjokong jang boleh dikatakan djuga tjukup kuat....kalau dapat dikemukakan di sini, bahwa fihak jang pro dansa atau pembela dansa belum berani menampakkan diri.... Mungkinhal ini jang dinamakan “malu2 kutjing” berani berbuat tidak mau memperkuat” (*SM*, 12 Agustus 1952).

Namun demikian artikel tersebut berusaha menjembatani dan memberikan solusi pada pihak-pihak yang pro- dan anti-dansa, dengan meminta pemerintah untuk bertindak, antara lain dengan memberikan fasilitas dan ruang berkesenian bagi anak muda (*SM*, 12 Agustus 1952).

Mengenai tindakan yang akan diambil oleh Panitia Anti Dansa terhadap dansa di rumah-rumah tangga biasa, di bar-bar dan di rumah-rumah makan “masih dipertimbangkan”, tetapi ”bukannya tidak mungkin kalau semangat pemuda meluap dikhawatirkan terjadi penyerbuan seperti di lain-lain tempat”(SM, 15 Juli 1952).Tindakan terhadap mereka yang dianggap menyebarkan dansa dilakukan secara sepihak. Salah satunya dialami wanita terpelajar di Daerah Besuki yang juga pegawai Pemerintah Daerah. Lantaran wanita ini suka berdansa, maka rumahnya mendapat palang di pintu. Akhirnya ia pun menghentikan kebiasaannya untuk berdansa (*SM*, 16 September 1952). Aksi memberi palang pintu ini tidak diketahui dengan pasti pelakunya. Menariknya justru pemberitaan di *Suara Masyarakat* memberi kesan positif atas aksi sepihak tersebut dengan kalimat:

”Gerakan penjebaran dansa jang digentjarkan di daerah Besuki hingga kini tak mendapat tempat sama sekali. Rakjat tak memberikan perhatian terhadap soal ini. Djumlah penduduk daerah karisedenan Besuki jang sebanyak 3 1/2 djuta orang itu hanja seorang sadja jang kini suka berdansa”(SM, 16 September 1952).

Perihal larangan dansa yang dianggap Barat ini menjadi topik yang hangat dan tak kunjung selesai. Misalnya di tahun 1957, anggota DPR di Bandung dari Fraksi Masjumi Hadji Ali Akbar, mengatakan pada media supaya dansa dan *rock and roll* dilarang (SM, 19 Februari 1957). Wacana anti dansa tidak berhenti di era itu dan tidak terbatas pada satu kelompok penganut aliran ideologi tertentu saja. Di tahun-tahun sesudahnya (hingga 1964) salah satu lembaga kebudayaan saat itu, yaitu LEKRA<sup>2</sup> memasukkan ke dalam agenda dan propagandanya sebuah program ”gerakan *twist*” atau gerakan penghentian atas ”dansa-dansi, *rock and roll* dan sebagainya karena dianggap memperburuk budaya nasional (*Harian Rakjat*, 29 Maret 1964). Pelarangan adalah salah satu upaya membendung budaya itu. Larangan dansa menunjukkan penyaringan unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dan dianggap berpotensi merusak identitas budaya lokal meskipun proses penyaringan tersebut dilakukan melalui standar-standar yang tidak terlalu jelas dan banyak pertentangan dan perbedaan di sana-sini.

Di luar kontroversi dansa yang mencerminkan perbedaan pandangan tentang hakikat identitas keindonesiaan, kiprah kewargaan sosial masyarakat terlihat dari beragamnya kegiatan kesenian dan kebudayaan. Dalam artikel ini kami sajikan dua peristiwa. Pertama adalah pertunjukan kesenian karawitan dan dalang oleh kelompok orang-orang tuna grahita. Koran *Sin Po* 8 Juni 1955 memberitakan bahwa komunitas orang-orang tuna grahita di Kota Solo melangsungkan pergelaran karawitan dan pertunjukan dalang wayang kulit yang ”100 persen oleh orang-orang poenderita cacat buta”. Pelaksanaan pergelaran tersebut terselenggara dengan dukungan teknis dari ”Kantor Penempatan Tenaga Khusus” dari Jawatan Penempatan Tenaga Pusat yang berkedudukan di Solo”.

Peristiwa kedua berupa lomba seni baca Alquran yang diadakan oleh Panitia Bulan Puasa Syuhada Yogyakarta Bagian Tarawih dan Tadarrus. Lomba diadakan tanggal 20 malam 21 Mei 1955 yang akan datang bersamaan ”chatam Al Quran”. Perlombaan Seni Baca Al Quran itu diikuti oleh peserta putera dan puteri masing-masing bertempat di Mushala Wanita dan di ruang-ruang kelas (mesjid). Perlombaan dibagi dalam dua kategori, yaitu peserta berumur di bawah 15 tahun dan peserta yang usianya 15 tahun ke atas. Acara ini menyulut antusiasme banyak peserta sehingga panitia harus melakukan seleksi tahap awal pada tanggal 16 dan 17 Mei. Sebanyak 10 putera dan 10 puteri terpilih dalam seleksi awal, selanjut mengikuti babak final pada tanggal 20-21 Mei 1955 (*KR*, 12 Mei 1955).

Dua contoh peristiwa itu (yaitu pertunjukan karawitan dan dalang, dan lomba seni baca Alquran) tampak sebagai peristiwa harian yang dapat terjadi di manapun dan kapanpun, bahkan sampai sekarang. Namun ketika ditempatkan dalam konteks gairah kolektif tahun 1950an, peristiwa-peristiwa itu mencerminkan keinginan warga untuk ambil bagian dalam dinamika masyarakat yang sedang terjadi. Pertunjukan karawitan dan dalang menunjukkan keinginan sebuah komunitas warga (yaitu komunitas tuna grahita di Kota Solo) yang juga ingin diakui keberadaannya di tengah hiruk-pikuk perubahan saat itu. Lomba seni baca Alquran terjadi setiap waktu. Namun, pelaksanaannya di tahun 1950an menegaskan bahwa gairah masyarakat pada periode tersebut bukan hanya soal ”politik keras” pembangunan negara. Pertunjukan karawitan dan seni baca Alquran menegaskan proses dari dan oleh masyarakat membentuk identitas kewargaannya sendiri.

---

<sup>2</sup> Lekra adalah lembaga kebudayaan yang didirikan di tahun 1950. Lembaga ini memiliki kedekatan ideologi dengan Partai Komunis Indonesia.

### C. Perayaan-perayaan Sebagai Eskpresi Kewargaan Sosial

Kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat juga berlangsung dalam bentuk kegiatan perayaan dan hajatan. Bentuknya bermacam-macam, yaitu pertunjukan, pertandingan olahraga (*volleyball*, *voetball* dan lain-lain). Perayaan-perayaan menunjukkan gairah rakyat dalam merespons dan berpartisipasi dalam pemeliharaan “monumen-monumen” kolektif peristiwa yang dianggap penting di masyarakat.

Kegiatan perayaan yang cukup menonjol dalam pemberitaan surat kabar adalah perayaan hari Kemerdekaan 17 Agustus. Dalam perayaan 17 Agustus oleh masyarakat itu, terlihat dinamika keterlibatan mereka. Sebagai contoh, para pemuda Madjopura di Jawa Tengah bergiat menyiapkan perayaan 17 Agustus dengan mengadakan berbagai pertunjukan dan upacara di makam pahlawan (*Pemandangan*, 16 Agustus 1952). Di Malang, Jawa Timur diadakan “pertandingan Gong2 Tjatur” pada 1952. Pertandingan Gong Tjatur adalah suatu pertandingan catur yang diakhiri dengan bunyi gong (*SM*, 7 Agustus 1952).

Pada perayaan kemerdekaan Agustus 1952 ada sebuah insiden di Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang berakhir dengan dipenjaranya puluhan orang peserta lomba gerak jalan. Insiden itu bermula dari sebuah acara perlombaan baris berbaris yang merupakan bagian dari acara perayaan hari kemerdekaan. Sekitar pukul 10.00 pagi, kelompok barisan dari desa-desa berkumpul di Kecamatan Tikung termasuk kelompok barisan dari Desa Djotosanur. Kelompok ini membawa properti berupa “kapal perang, bersenjatakan 8 pucuk meriam dan mercon yang terbuat dari bumbungan bambu. Anggotanya berdandan persis menyerupai barisan Angkatan Laut Republik Indonesia, dengan emblem yang dibikin dari karton, dan dua orang anggotanya memakai *helmhoed* (helm marinir) sebagai polisi militer. Kabar yang beredar sebagaimana ditulis oleh surat kabar *Suara Masyarakat*, *helmhoed* tersebut adalah *helmhoed* asil yang telah rusak, lalu dikapur putih dan dilekati huruf PM dari kertas. “Pasukan” ini mengatur barisan dengan sangat rapi. Kelompok barisan ini mendapat juara pertama. Namun karena asesoris dan mercon bubung yang mereka bawa dinyalakan, maka 63 anggota kelompok ini ditangkap dan dipenjara karena dianggap membahayakan keselamatan umum (*SM*, 26 Agustus 1952).

Dinamika masyarakat dalam merayakan 17 Agustus juga termasuk ditulisnya sebuah opini surat kabar oleh seseorang bernama Moeljadi Notowardojo. Menurutnya, dalam usia Indonesia yang ketujuh tahun, kemerdekaan “belum memberikan harapan-harapan bagi bangsa Indonesia seluruhnya, yaitu kebahagiaan bersama”. Menurut Moeljadi Notowardojo, hal ini dikarenakan adanya pertentangan paham antara pemimpin. Penulis yang mengidentifikasi dirinya sebagai “pengamat” itu menulis:

”Meluapnya napsu perorangan [yang] merugikan bangsa. Hal tersebut juga menimbulkan persoalan ketidakpercayaan kepada pemerintah sendiri. Karena itu penting mencerdaskan masyarakat agar tidak dipermainkan oleh golongan-golongan tertentu”(SM, 16 Agustus 1952).

Selain 17 Agustus, peringatan 100 tahun meninggalnya Pangeran Diponegoro juga mendapatkan perhatian luas masyarakat melalui perayaan. Koran *Kedaulatan Rakyat* memberitakan bahwa tanggal 8 Januari 1955 diadakan peringatan 100 tahun “pahlawan kebangsaan”. Perayaan diadakan di kediaman residen Kedu, “rumah yang terdapat kamar tempat pahlawan nasional kita itu ditawan”. Perayaan dihadiri oleh “pembesar-pembesar ketentaraan dan sipil di antaranya *overste* Sarbini, Gubernur Mangunnegoro, residen Kedu, wakil jawatan Jawa Tengah dan pemimpin setempat”. RRI Jogja dan

Semarang diberitakan merekam jalannya upacara. Acara dibuka dengan penyalaan api unggun oleh Ketua Panitia Sutirman, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Pangeran Diponegoro. “Kemudian ceramah oleh K. Tjokrodirjo, Ny Sahir dan S. Brodjonegoro tentang Diponegoro dari sudut politik, kultural, pedagogis dan keluarga” (*KR*, 8 Januari 1955).

*Kedaulatan Rakyat* juga menulis Bahwa Peringatan meninggalnya Diponegoro berlangsung secara nasional, diisi dengan berbagai kegiatan antara lain “ziarah ke makam-makam pahlawan oleh anak-anak sekolah, kepanduan dan organisasi pemuda”. Juga diadakan diskusi tentang jasa-jasanya. Selanjutnya “dilakukan pengumpulan uang logam yang ada gambarnya Diponegoro dan penjualan gambar-gambar Diponegoro untuk gedung nasional dan lain-lain”. Kementerian Penerangan menerbitkan brosur dan mendirikan patung Diponegoro di Lapangan Banteng Jakarta sedangkan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan Pekan Diponegoro (*KR*, 4 Januari 1955).

Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam perayaan 17 Agustus dan dalam peringatan 100 tahun meninggalnya Diponegoro menunjukkan upaya masyarakat memperbaiki “monumen-monumen” ingatan kolektif di dalam kehidupan mereka. Kedua monumen tersebut jelas memiliki bentuk institusi yang kuat. Artinya, upaya memperingati 17 Agustus dan 100 tahun meninggalnya Diponegoro bukan inisiatif orisinal warga masyarakat melainkan inisiatif institusi negara. Tema yang terkait perayaan pun secara substansi terkait dengan proyek elit, yaitu “kelahiran sebuah negara” dan “kematian pahlawan kebangsaan”. Meskipun demikian, keterlibatan warga dalam kedua perayaan tersebut menunjukkan bahwa warga memiliki cara mereka sendiri dalam menampilkan wujud pemaknaan mereka sendiri atas kedua peristiwa.

Di samping perayaan yang memiliki akar institusi negara, berbagai kegiatan komunitas menegaskan wujud dari upaya komunitas itu dalam menunjukkan apa makna menjadi warga masyarakat. Di sini dapat disajikan pemberitaan tentang perayaan Cap Go Meh di Kota Magelang tahun 1955. Perayaan diadakan oleh perkumpulan Tionghoa dan “dikunjungi pers dan undangan, antara lain Residen Kedu, Bupati dan Walikota Magelang, serta Kepala Kepolisian Kedu dan para pembesar setempat dan kaum terkemuka Tionghoa.” Perayaan diramaikan keroncong orkest. Ketua Panitia, Oei Tjang Kiem, dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kaum Tionghoa bersedia sekuat tenaga bekerja bersama bangsa Indonesia guna kepentingan negara Republik Indonesia. Sebaliknya, pejabat yang memberi sambutan meminta agar “dalam memasuki tahun baru Imlek terdapat saling kerja antara kedua golongan tersebut guna perjuangan negara” (*KR*, 9 Februari 1955).

Di lapangan olah raga wilayah Jatinom, Klaten diadakan “Pista Rakyat Jatinom” pada 28-29 Mei 1955. Pesta rakyat diisi dengan “pelbagai perlombaan antara lain melukis, mengarang cerita, tembang, seni syara, seni tari, olah raga dan lain-lain dengan diberi sekedar hadiah kepada para pemenangnya”. Lalu diadakan pertunjukan “Dagelan Mataraman”. Diberitakan bahwa warga “atas inisiatif mereka sendiri” mengumpulkan uang sebanyak Rp 2.500 untuk penyelenggaraan pesta rakyat tersebut. “Pada hari pista rakyat itu orang-orang akan membawa makanan sendiri-sendiri dari rumahnya dan dimakan bersama-sama di situ” (*KR*, 12 Mei 1955).

Di Yogyakarta, apa yang disebut “pesta rakyat” tahun 1955 diselenggarakan di daerah Gamelan Lor, Poncowinatan dan Gowongan Kidul. Kegiatan itu diisi dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan seni, yaitu “seni bentuk, seni rupa, seni suara, seni dagelan dan tari”. Perlombaan seni bentuk meliputi lukisan berwarna biasa dan skets, karikatur, karya cerita bergambar, tukul, patung, relief. Juri terdiri dari Sudjojono, Affandi, Hendra Gunawan dan Ramli. Seni sastra meliputi bahasa Jawa dan Indonesia

masing-masing meliputi sajak, cerita pendek, skets masyarakat, dan reportase. Jurinya adalah Sabar Santoso, Tjokro Sumarto, Sutjipto, Sunarso, Sukarno Wirjono, Wurjono Soemartoto, M. Suwardo. Seni suara Jawa dan Indonesia masing-masing meliputi perseorangan, rombongan, komposisi perseorangan, dan komposisi rombongan. Jurinya Purwosudirjo, Tjokrosumarto, Hendra Gunawan, Hendrosugondo dan Atmonadi. Seni dagelan (bahasa Jawa dan Indonesia) meliputi perseorangan dan rombongan dan jurinya Tjokrosumarto, Suromo, Hendra, A. Salam, Rukinah dan Atmonadi. Seni tari meliputi klasik dan modern masing-masing untuk perseorangan dan rombongan. Jurinya Sunardi, Atmonadi, B. Kussudirdjo, Hendrosugondo, Sumilah dan Sukorini (*KR*, 6 Mei 1955).

Berbagai perayaan dan pesta rakyat tersebut mencerminkan antusiasme dan gairah warga masyarakat. Melalui aktivitas budaya, warga menunjukkan keterlibatan dan menegaskan kebutuhan akan pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat pada jamannya. Itulah kewargaan sosial tahun 1950an. Jenis kewargaan sosial ini bersifat cair dalam arti bentuk dan cara pengungkapannya bergantung pada dinamika sehari-hari masyarakat. Karena tidak selalu berkaitan dengan proyek kewargaan negara yaitu penguatan negara-bangsa, kewargaan sosial tahun 1950an memberikan perspektif atas makna dan proses menjadi warga masyarakat saat itu yang berbeda dari apa yang selama ini telah disajikan dalam historiografi.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Ekspresi kewargaan sosial tahun 1950an menunjukkan sifat terbuka. Artinya, massa rakyat sebagaimana terpotret dalam pemberitaan surat kabar menunjukkan partisipasi dan antusiasme dalam dinamika sehari-hari melalui aktivitas-aktivitas budaya. Partisipasi dan antusiasme tersebut menunjukkan keterlibatan, tetapi juga kebutuhan dan keinginan rakyat untuk diakui keberadaannya di dalam gerak dinamis masyarakat yang sedang terjadi kala itu. Secara keseluruhan aktivitas-aktivitas budaya yang disajikan dalam artikel ini dapat dikategorikan sebagai menampakkan tiga hal, yaitu wacana kewargaan sosial, bentuk kewargaan sosial dan ekspresi kewargaan sosial.

Wacana kewargaan sosial yang muncul ke ranah publik tahun 1950an merupakan kelanjutan dari perdebatan tentang identitas budaya yang telah berkembang di Hindia Belanda setidaknya sejak awal abad keduapuluh. Kegiatan publik seperti perayaan-perayaan komunitas Tionghoa, misalnya, bukan sesuatu yang baru muncul tahun 1950an tetapi telah berlangsung sejak periode kolonial. Namun inti dari perdebatan tetap sama, yaitu perumusan jati diri kolektif dan peran dari unsur-unsur kebudayaannya. Dikotomi Timur versus Barat dalam menemukan akar identitas kolektif adalah perdebatan yang telah muncul di tahun 1920an dan terus menjadi isu penting di tahun 1950an. Namun di luar soal substansi dikotomi dan perdebatan itu, munculnya kembali persoalan identitas kolektif di tahun 1950an menunjukkan bahwa warga (dalam posisi pendapatnya masing-masing) ingin terlibat dan diakui dalam mendefinisikan makna identitas itu. Karena itu perdebatan tentang identitas kolektif tersebut merupakan wujud dari kewargaan sosial masyarakat.

Bentuk kewargaan sosial yang dipaparkan dalam artikel ini menguatkan perdebatan tentang wacana kewargaan. Pertukaran ide tentang boleh atau tidaknya dansa, misalnya, mencerminkan bentuk tentang bagaimana masing-masing elemen “menerjemahkan” wacana tentang identitas kolektif yang

dibayangkan. Di luar persoalan bentuk kewargaan itu, warga masyarakat sangat aktif mengekspresikan partisipasi mereka dalam aneka kegiatan dalam masyarakat, khususnya adalah perayaan-perayaan. Melalui ekspresi perayaan itu, warga menegaskan keberadaan mereka dan posisi mereka secara keseluruhan di dalam perubahan masyarakat tahun 1950an.

Di sini harus dikatakan bahwa tidak semua partisipasi warga masyarakat merupakan inisiatif “orisinil” mereka tetapi respons atas inisiatif institusi tertentu. Konsep kewargaan yang didisain oleh institusi-institusi kemudian dimassalkan dengan melibatkan massa rakyat. Pada tataran ini, terjadi “dialektika” antara gagasan kewargaan yang menyebar melalui institusi dengan praktik kewargaan masyarakat. Di satu sisi gagasan kewargaan yang dipahami oleh kelompok elit terus menyebar lewat program-program “pemberdayaan” masyarakat. Di sisi lain, pada tingkat akar-massa, rakyat mengekspresikan kewargaan dengan “cara mereka sendiri”. Pada beberapa kelompok kebudayaan, misalnya, pelaku-pelaku budaya di desa terus aktif dalam berbagai kegiatan budaya yang telah menjadi agenda dan kebiasaan mereka. Jadi kegiatan masyarakat desalah yang kemudian diklaim secara politik oleh kelompok elit melalui pemberian bantuan peralatan dan lain-lain. Elit politik membingkai praktik kebudayaan di tingkat desa itu dengan kerangka visi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa akar massa memiliki perpektif dan cara konstruksi sendiri tentang konsep kewargaan.

Terakhir, perlu sekali lagi ditegaskan bahwa gelora dan geliat tahun 1950an bukanlah gelora dan geliat pembentukan negara-bangsa saja, tetapi juga penuh dengan proses dinamis masyarakat secara keseluruhan dan “apa adanya”. Implikasi dari hal ini adalah bahwa untuk membaca periode 1950an secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang menjauhkan periode tersebut dari persinggungan dan kontestasi ideologi dan politik. Aspek kehidupan sehari-hari menjadi kunci penting untuk menempatkan periode 1950an “di dalam jiwa jamannya sendiri” sebagaimana dianjurkan Lindsay dan Nordholt sebagaimana dikutip di awal tulisan. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang mengakomodasi dan mengakui peristiwa-peristiwa sehari-hari tahun 1950an, yang mungkin tampak “apa adanya” dan “biasa saja”, sebagai sama pentingnya dengan peristiwa-peristiwa besar yang berkerangka institusi negara.

## **B. Saran**

Penelitian ini mencoba memahami pembentukan bangsa tahun 1950an dengan mengulas aspek-aspek di luar pembentukan negara. Sayangnya, cakupan objek material penelitian masih sangat terbatas yaitu pada aspek sosio-kultural dan seni. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas, di luar aspek perkara hukum, dapat mencerminkan proses pembentukan kebangsaan yang ‘genuine’ dari sisi sifat dan pola substansi perkara. Tentu ini hanya salah satu kemungkinan.

Hal lain yang juga penting adalah bahwa pemahaman atas suatu periode dalam sejarah sering terpaku pada satu dimensi atau kerangka. Dalam hal ini, peristiwa-peristiwa pada dekade 1950 sering dipahami hanya sebagai dan dalam rankat state-building. Sejarah menjadi kehilangan narasi sosial yang sifatnya sehari-hari. Aspek keseharian perlu lebih diberi tekanan pada penelitian-penelitian berbagai periode.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjabana, S. T. (1954). 'Menudju Masyarakat dan Kebudayaan Baru', *Polemik Kebudayaan*, cetakan ketiga, Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K.
- Badriksa, I W.. (2006). *Sejarah untuk SMA Jilid 3 Kelas XII Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bertrand, J. dan Andre Laliberte (eds), (2010). *Multination States in Asia: Accommodation or Resistance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Day, T. (2010). *Cultures at war: The Cold War and cultural expression in Southeast Asia*. New York: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program Cornell University.
- Lindsay, J. (2012). 'Heirs to World Culture 1950-1965: An Introduction', dalam *Menjadi Indonesia 1950-1965*. Jakarta dan Denpasar: KITLV-Jakarta dan Pustaka Larasan.
- Lindsay, J dan Liem, M. (ed). (2012). *Ahli waris budaya dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*. Jakarta dan Denpasar: KITLV-Jakarta dan Pustaka Larasan.
- Marshall, T.H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muchammad, M.S. (1952). 'Tentang Pemikiran Gerakan Anti Dansa', *Suara Masyarakat*, 7 Agustus.
- Nordholt, H. S. (2011a). 'Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity and the Post-colonial State', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167 (4): 386—404.
- Nordholt, H. S. (2011b). 'Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies: An illustrated hypothesis', *Journal of Southeast Asian Studies* 42 (3): 435—457.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B. Saptari, R. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta & Pustaka Larasan.
- Reid, A. (2010). 'Revolutionary state formation and the Unitary Republic of Indonesia', dalam *Multination states in Asia: Accommodation and resistance*, ed. Jacques Bertrand and Andre Laliberte. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ricklefs, M.C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Suwignyo, A., Yuliantri, R. D. A.(ND) 'Praktik Kewargaan Sehari-hari sebagai Praktik Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah', proses terbit pada *Jurnal Ketahanan Nasional*
- Vickers, A. (2008). 'Mengapa Tahun 1950an Penting bagi Kajian Indonesia', dalam *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, ed. Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta & Pustaka Larasan.
- Wardhana, D. (1952). 'Tentang Pemikiran: Gerakan Anti Dansa Mendapat Sokongan'. *Suara Masyarakat* 31 Juli.
- Yean, S. C. (2012). 'Hidden transcript from below in rural politics of the Philippines: Interpreting the Janus-facedness of patron-client ties and tulong (help)', *Southeast Asian Studies* 1 (2): 273—299.

## **Surat Kabar Sejaman**

*Harian Rakjat*, 29 Maret 1964.

*Kedaulatan Rakyat*, 7 Februari 1955

*Kedaulatan Rakyat* 12 Mei 1955, 'Perlombaan Seni Baca Al Quran'

*Kedaulatan Rakyat*, 8 Januari 1955, 'Peringatan 100 tahun wafatnya P. Diponegoro, dimulai'

*Kedaulatan Rakyat* 4 Januari 1955, '100 Tahun Wafatnya Pangeran Diponegoro akan Diperingati'

*Kedaulatan Rakyat*, 9 Februari 1955, 'Perayaan Cap Go Meh'

*Kedaulatan Rakyat* 12 Mei 1955, 'Pista Rakyat Jatinom'

*Kedaulatan Rakyat* 6 Mei 1955

*Pemandangan*, 8 Nov 1956, 'Pertundjukan Seni Balet Untuk Amal'

*Pemandangan*, "Sandiwara Mitra Sunda akan Main di Bandung "12 Februari 1957.

*Pemandangan*, 3 Oktober 1956, 'Tontonan'

*Sin Po*, 8 Juni 1955 hlm. 11, 'Pergelaran Karawitan dan Pedalangan oleh Orang2 Buta'

*Sin P*, 16 Agustus 1952, 'Pemuda Madiopuro Giat'

*Suara Masyarakat*, 26 Agustus 1952, 'Sekitar Pemberantasan Buta Huruf di Kota Surabaya'

*Suara Masyarakat*, 27 Agustus 1952

*Suara Masyarakat*, 27 Agustus 1952

*Suara Masyarakat*, 9 Sept 1952, 'Pertundjukan Jang *Nood Duur*'

*Suara Masyarakat*, 15 Desember 1956, 'Pertunjukkan Film Kanak2'

*Suara Masyarakat*, 23 Juli 1952. 'Perdebatan Mengenai Pemberantasan Pengaruh Dansa: Menghendaki bar2 dan ruangan dansa ditutup'

*Suara Masyarakat*, 12 Agustus 1952, 'Panggung Umum: Pemuda Democrat Indonesia tentang Dansa'

*Suara Masyarakat*, 15 Juli 1952, 'Gerakan Anti Dansa Mendapat Sokongan'

*Suara Masyarakat*, 16 Sept 1952, 'Dansa Didaerah Besuki Mendapat Palang Pintu'

*Suara Masyarakat*, 19 Februari 1957. 'Anggota DPR minta larang dansa Rock and Roll: menghebohkan Masyarakat Bandung'.

*Suara Masyarakat*, 7 Agustus 1952

*Suara Masyarakat*, 26 Agustus 1952

*Suara Masyarakat*, 16 Agustus 1952. Herogenitas ke dalam!